



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIAMIS**

RENCANA

KERJA

TAHUN 2023

Diskominfo Kab. Ciamis

Jl. Jenderal Sudirman No. 220, Kel. Sindangrasa
Kec. Ciamis, Kab. Ciamis No. Telepon (0265) 773000

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT kami dapat menyusun rencana kerja (RENJA) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis Tahun 2023 sebagai pedoman dan acuan bagi semua unsur dinas dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan, sebagai upaya tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan yang telah di realisasikan sampai dengan tahun 2022.

Dalam penetapan program dan jenis kegiatan yang hendak dilaksanakan mengacu kepada renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024, serta merupakan penjabaran dari renstra Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024.

Kami sadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis, belum sepenuhnya sempurna walaupun demikian semoga dapat menjadi acuan capaian kinerja bagi Aparatur Instansi Pemerintah khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023, semoga dapat dijadikan tolak ukur kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pada Tahun Anggaran 2023.

Ciamis, 30 Januari 2023

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIAMIS



H. TINO ARMYANTO L S, S.T., M.Si.

Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 197503042001121002

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	BAB I
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.2 LANDASAN HUKUM	I-1
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	I-3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	I-4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN SEBELUMNYA	BAB II
2.1 EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA	II-1
2.1 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS	II-4
2.2 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	II-7
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS	II-8
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	BAB III
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL, PROVINSI DAN KABUPATEN	III-1
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023	III-7
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023	III-9
BAB IV PENUTUP	IV-1

DAFTAR TABEL

	Hal
2.1 Tabel Capaian Program/ Kegiatan Tahun 2022	II-1
2.2 Capaian Indikator Dinas Komunikasi dan informatika Tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2022	II-4
2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika	II-16

DAFTAR GAMBAR

Hal

2.1	Grafik capaian target Evaluasi SPBE Urusan Kominfo, Urusan Statistik dan Persandian Tahun 2021-2022	II-6
2.2	Grafik capaian target Urusan Penunjang (Non Urusan) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Tahun 2021-2022	II-7

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelayanan publik yang berkualitas, adalah sebagai salah satu ciri penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu perlu adanya keberpihakan pelayanan publik kepada kepentingan masyarakat. Pelayanan publik pada hakikatnya dirancang dan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satu bentuk pelayanan publik adalah penyelenggaraan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten Ciamis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis.

Sebagai salah satu perangkat daerah, maka dalam penyusunan program kerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika juga mengacu pada rencana pembangunan pemerintah daerah baik jangka pendek maupun menengah, sehingga terwujud sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara 1950);
2. Undang – undang Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi;
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permen Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2013.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis.

21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika;
25. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 83 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah
26. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 555/Kpts.180-Huk/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis tahun 2023 selanjutnya disebut Renja Diskominfo Tahun 2023 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah yang menggambarkan rencana tahunan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Ciamis khususnya pada Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian. Dokumen Rencana Kerja Diskominfo untuk tahun 2023 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi Dan Informatika.
- b. Untuk menentukan capaian program/ kegiatan tahunan, kegiatan prioritas Dinas Komunikasi Dan Informatika.
- c. Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renja adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun.
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Ciamis.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II

PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021

Memuat pelaksanaan Renja SKPD tahun 2021 dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, serta program dan kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN SEBELUMNYA

2.1 EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022 DAN CAPAIAN
RENSTRA

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Strategis OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Rencana Strategis OPD digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan OPD dalam melaksanakan Program dan Kegiatan, mengetahui realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja OPD. Evaluasi didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun tahun sebelumnya berikut adalah hasil evaluasi renja pada tahun 2022 :

Tabel 2.1 Tabel Capaian Program/ Kegiatan Tahun 2022

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Keterangan
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	
	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	
	c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100	
	d. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100	
	e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	
	f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan		

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Keterangan
	Akhir Tahun SKPD	100	
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100	
4.	Admnsitrasi Umum Perangkat daerah	100	
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	100	
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	
	d. Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	100	
	e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	
	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	
	a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	
	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	
	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	
	b. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	
	c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Keterangan
II	Program Informasi dan Komunikasi Publik	144,3,,5	
1.	Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	144,35	
	a. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	277,34	
	b. Pelayanan Informasi Publik	100	
	c. Layanan Hubungan Media	100	
	d. Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100	
III	Program Aplikasi Informatika	105,44	
1.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	110,89	
	a. Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/ Kota	102,97	
	b. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	118,80	
2.	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100	
	a. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	100	
	b. Pengembangan dan pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	100	
IV	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100	
1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	100	
	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	100	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Keterangan
	b. Membangun Metadata Statistik Sektoral	100	
V	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	100	
1.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100	
	a. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	100	

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS

Diskominfo merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Ciamis yang menyelenggarakan pelayanan kepada aparatur dan masyarakat. Adapun bentuk pelayanan dan sarana pendukung yang sudah cukup dikenal di kalangan aparatur dan masyarakat adalah sebagai berikut :

2.2.1 Capaian Indikator Kinerja Diskominfo Tahun sebelumnya sampai dengan Tahun 2022

Tabel 2.2 Capaian Indikator Dinas Komunikasi dan informatika Tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi Capaian Indikator 2021	Persentase Capaian Indikator 2021	Target 2022	Realisasi Capaian Indikator 2022	Persentase Capaian Indikator 2022
1	2	3	4	5		6	7	8
1.	Indeks Domain tata kelola SPBE	Indeks aspek perencanaan strategis SPBE	2.00	2.50	125.00 %	2.60	2.50	96.15 %
		Indeks aspek teknologi informasi dan komunikasi	1.67	3.25	194.61 %	3.25	3.25	100.00 %
		Indeks aspek penyelenggara SPBE	2.00	2.00	100.00 %	2.00	2.00	100.00 %

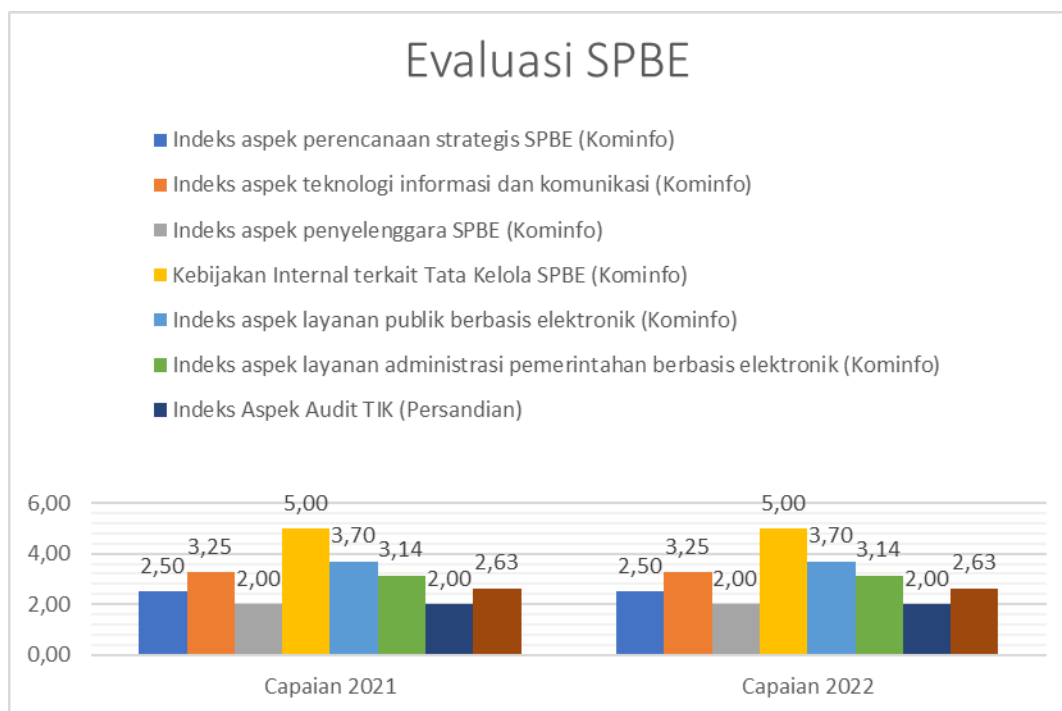
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi Capaian Indikator 2021	Persentase Capaian Indikator 2021	Target 2022	Realisasi Capaian Indikator 2022	Persentase Capaian Indikator 2022
2.	Indeks Kebijakan Internal SPBE	Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	5.00	5.00	100.00 %	5.00	5.00	100.00 %
3.	Indeks Domain layanan SPBE	Indeks aspek layanan publik berbasis elektronik	3.14	3.17	100.95 %	3.17	3.17	100.00 %
		Indeks aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik	2.50	3.70	148.00 %	3.70	3.70	100.00%
4.	Indeks Domain manajemen SPBE	Indeks Penerapan Manajemen SPBE	1.50	2.63	175.33 %	2.63	2.63	100.00 %
		Indeks Aspek Audit TIK	0.60	2.00	333.33 %	2.00	2.00	100.00%
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP	BB	BB	100.00 %	BB	BB	100.00 %
		Level Maturitas SPIP	3	3	100.00 %	3	3.4	113.33 %
		Kualitas Laporan Keuangan	550	748.1	136.02 %	830	818.34	98.60 %
6	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	IKM Diskominfo	84	85.31	101.56 %	84.50	91.43	108.20 %

Capaian indikator dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan adanya konsistensi peningkatan sesuai dengan target kinerja. Sasaran pada evaluasi SPBE dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 yaitu hampir semua targaet sasaran mencapai 100% adapun pada indikator indeks aspek perencanaan strategis mengalami penurunan secara target namun memiliki nilai yang tetap pada capaian indikator tersebut sehingga pada indikator tersebut tetap tercapai secara realisasi dari tahun 2021. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian target pada evaluasi SPBE tahun 2022 hampir mencapai 100%. Penjelasan dari masing-masing indikator terdapat pada lampiran Evaluasi SPBE Tahun 2021.

Non urusan yang terdapat pada tabel tersebut hampir seluruhnya mencapai 100% yaitu pada sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan meningkatnya kinerja pelayanan publik. Akan tetapi pada kualitas laporan keuangan tahun 2022 mengalami penurunan berdasarkan target namun tetap naik berdasarkan capaian tahun sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran pada non urusan mencapai 100%.

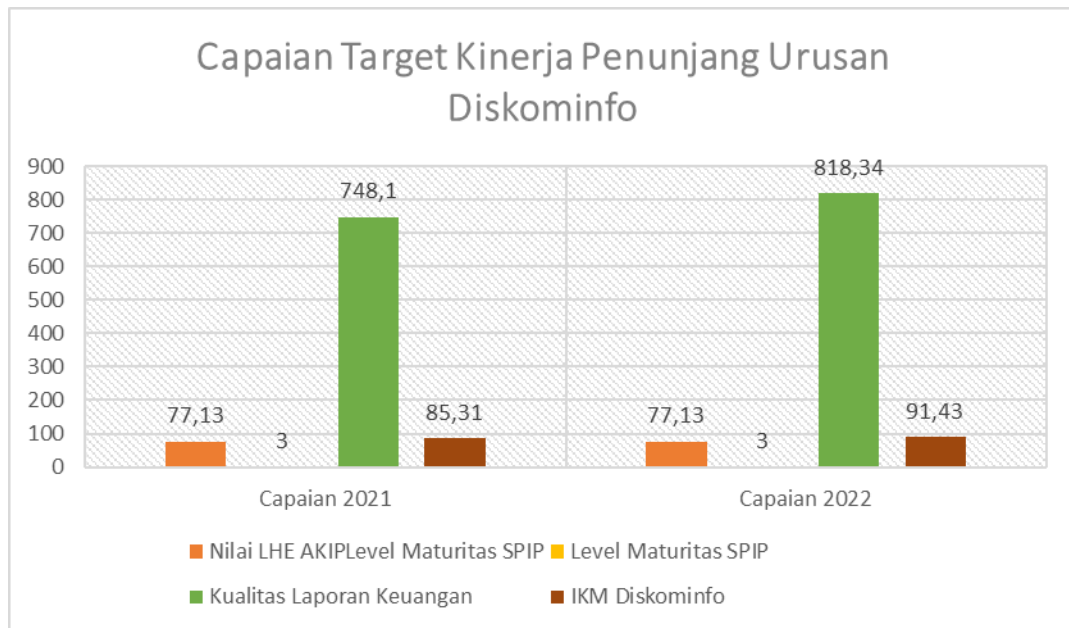
Masing-masing target dan capaian realisasi tersebut dapat dilihat berdasarkan grafik berikut :

Gambar 2.1 Grafik capaian target Evaluasi SPBE Urusan Kominfo, Urusan Statistik dan Persandian Tahun 2021-2022



Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja hasil Evaluasi SPBE dari tahun ke tahun mengalami konsistensi dengan persentase rata-rata 100%.

Gambar 2.2 Grafik capaian target Urusan Penunjang (Non Urusan) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Tahun 2021-2022



Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja urusan penunjang kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dengan persentase melebihi 100% dari masing-masing target.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

a. Urusan Komunikasi dan Informatika

Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan pemanfaatan PPID pada perangkat daerah dan belum terbentuknya PPID Pelaksana tingkat Kecamatan
- 2) Belum optimalnya penyebaran konten di Media Komunikasi Publik yang dikelola oleh OPD

Bidang Persandian dan Telematika

- 1) Dengan banyaknya layanan aplikasi yang dikelola sampai saat ini, kapasitas penyimpanan pada server kurang memadai
- 2) Berdasarkan monitoring dan evaluasi ditemukan adanya kebutuhan penambahan bandwidth pada OPD

b. Urusan Statistik

Bidang Pengelolaan Statistik dan Data Elektronik

- 1) Tidak terlembaganya forum statistik sektoral Kabupaten Ciamis sehingga menyulitkan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Ciamis.
 - 2) Belum Optimalnya Tata Kelola Data Statistik sektoral
 - 3) Belum Optimalnya Koordinasi dengan perangkat daerah terkait penyediaan data statistik sektoral
 - 4) Pemahaman Produsen data tentang metadata belum optimal
- c. Urusan Persandian
- Bidang Persandian dan Telematika
- 1) Belum optimalnya Pengamanan Informasi dan Data
 - 2) Belum tersedianya server untuk layanan tanda tangan elektronik (TTE)

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dengan hasil pencapaian target tahunan. Rancangan awal Renja yang telah disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Disamping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta indikator kinerja dan rencana capaiannya. Usulan program dan kegiatan dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika senantiasa diselaraskan dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	- Nilai LHE AKIP - Level Maturitas SPIP - Kualitas Laporan Keuangan - IKM	- BB - 3.4 - 830 - 93	41.863.274.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	- Nilai LHE AKIP - Level Maturitas SPIP - Kualitas Laporan Keuangan - IKM	- BB - 3.4 - 830 - 93	4.351.936.035	
01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %	38.500.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %	34.500.000	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.500.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	8.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	7.500.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.500.000	
01.2.02	Administrasi Keuangan	Persentase Kelengkapan Pelaporan Keuangan	100%	5.012.500.000	Administrasi Keuangan	Persentase Kelengkapan Pelaporan Keuangan	100%	2.705.040.000	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350 OB	5.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	250 OB	2.692.540.000	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	5.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		SKPD				Tahun SKPD			
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Dokumen	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Dokumen	7.500.000	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase OPD dengan Nilai IKM yang baik		275.000.000					

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	75.000.000					
01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Kali	200.000.000					
01.2.06	Administrasi Umum	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik	100 %	845.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik	100 %	93.292.683	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.898.400	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	250.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	13.935.000	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50.000.000					
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	200.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	28.000.000	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	3.485.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	20.000.000					
01.2.06.07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	41.974.283	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	31.564.671.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	7.214.350	
01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	750,000,000					

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	249.295.000					
01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	30,315,376,000					
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Jenis	200,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Jenis	7.214.350	
01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Jenis	50,000,000					

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100 %	1.985.250.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100 %	1.212.882.700	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	250,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	67.382.700	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	1.735.250.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	1.145.500.000	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.142.353.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	299.006.302	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	225,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	98.520.302	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Jenis	1.867.353.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Jenis	20.150.000	
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	375 m2	50,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	375 m2	180.336.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
02.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Domain layanan SPBE	3.49	1,050,000,000	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Domain layanan SPBE	3.49	727.801.769	
02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase diseminasi informasi dan komunikasi publik	100 %	1,050,000,000	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase diseminasi informasi dan komunikasi publik	100 %	727.801.769	
02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	940 Dokumen	195,000,000	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	940 Dokumen	454.500.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	400,000,000	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	70.725.000	
02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	29 Media	150,000,000	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	29 Media	38.500.000	
02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	25 Mitra	53.243.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2 Unit	200.000.000	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2 Unit	110.833.769	
03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	- Indeks Domain tata kelola SPBE - Indeks Kebijakan Internal SPBE	- 3.00 - 5.00	12,375,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	- Indeks Domain tata kelola SPBE - Indeks Kebijakan Internal SPBE	- 3.00 - 5.00	6.539.397.000	
03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sub domain Pemerintah Daerah yang didaftarkan	100 %	6,025,000,000	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sub domain Pemerintah Daerah yang didaftarkan	100 %	5.816.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/ Kota		-	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/ Kota		-	
03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	300 Titik Layanan	6,025,000,000	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	300 Titik Layanan	5.816.000.000	
03.2.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten yang dikelola	100 %	6.350.000.000	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten yang dikelola	100 %	723.397.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Data	550,000,000					
03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	3 Dokumen	150,000,000	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	3 Dokumen	21.031.000	
03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 aplikasi	100,000,000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 aplikasi	59.021.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	5.500.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	559.285.000	
03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	10 Dokumen	50,000,000	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	10 Dokumen	84.060.000	
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Domain manajemen SPBE	2.45	1,395,000,000	ROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Domain manajemen SPBE	2.45	935.462.196	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data statistik yang terintegrasi	100 %	1,395,000,000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data statistik yang terintegrasi	100 %	935.462.196	
02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	960 Data	670,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	960 Data	905.062.196	
02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	720 Data	90,000,000	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	720 Data	30.400.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	108 Orang	250,000,000					
02.2.01.04	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	12 Unit	385,000,000					
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Domain manajemen SPBE	2.45	400.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Domain manajemen SPBE	2.45	66.543.000	
02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan berbasis elektronik yang memiliki sistem keamanan	100 %	400.000.000	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan berbasis elektronik yang memiliki sistem keamanan	100 %	66.543.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	2 Dokumen	-					
02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	3 Layanan	400.000.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	3 Layanan	66.543.000	
JUMLAH				57.083.274.000				12.621.140.000	

Sumber : SIPD Diskominfo Kab. Ciamis

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAHAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL, PROVINSI DAN KABUPATEN

3.1.1 Telaahan Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 mengamanatkan 4 (empat) tahapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada RPJPN Tahap Ketiga yaitu Tahun 2015-2019, pembangunan nasional difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat. Pada RPJPN tahap akhir yakni RPJMN Tahun 2020-2024 sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020), fokus pembangunan diarahkan pada percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, dengan highlight utama di pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan sedang bertransformasi dari sebuah negara berkembang yang berpendapatan menengah ke atas menuju negara dengan ekonomi yang inklusif, modern, dan disegani di panggung internasional. Salah satu faktor pertumbuhannya adalah industrialisasi yang cepat, yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Produk Domestik Bruto (PDB) riil Indonesia mengalami pertumbuhan lebih dari dua kali lipat dari USD 0,5 T (nol koma lima triliun dolar Amerika Serikat) pada tahun 2009, dan menjadi USD 1,1 T (satu koma satu triliun dolar Amerika Serikat) pada tahun 2019. Transisi ekonomi Indonesia dibangun di atas prinsip-prinsip yang mendukung pertumbuhan berbagai sektor sekaligus membuka kesempatan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dengan ekonomi bernilai tambah yang terus meningkat dan didorong oleh sektor manufaktur dan jasa. Indonesia yang bercita-cita untuk menjadi satu dari lima ekonomi terbesar dunia pada tahun 2045 dan menjadi pemimpin di panggung internasional. Oleh sebab itu, transformasi digital akan menjadi katalis yang sangat

penting dalam perjalanan ini yang akan mendorong Indonesia berubah dari negara konsumen menjadi negara produsen. Presiden Joko Widodo dengan jelas memberikan arahan bahwa kita harus membajak momentum pandemi COVID-19 dan melakukan lompatan besar sebagai upaya nyata untuk membangkitkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Arahan tersebut direalisasikan dengan mempercepat agenda transformasi digital nasional melalui 5 (lima) langkah yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet, mempersiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, mempercepat integrasi pusat data nasional, mengembangkan sumber daya manusia dan talenta digital, serta menyiapkan berbagai regulasi dan skema pembiayaan untuk mendukung ekosistem digital. Lima langkah percepatan transformasi digital yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi fondasi bagi pengembangan roadmap Indonesia Digital. Indonesia Digital menetapkan enam arahan strategis untuk mewujudkan visinya. Enam arahan tersebut bertujuan untuk mengarahkan Indonesia menuju ekonomi berbasis inovasi dengan kapabilitas teknologi berkelas dunia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, dan masyarakat yang berbudaya digital serta siap menghadapi masa depan. Enam Arahan Strategis dimaksud adalah :

1. Membangun infrastruktur dan konektivitas yang aman dan andal dengan layanan berkualitas tinggi;
2. Mengubah Indonesia dari konsumen menjadi produsen teknologi melalui investasi pada berbagai platform yang memiliki nilai kepentingan strategis nasional, diantaranya pusat data, infrastruktur cloud, dan identitas digital nasional;
3. Meningkatkan kapabilitas digital pada sektor prioritas untuk meningkatkan daya saing geostrategis dan mendorong pertumbuhan yang inklusif;
4. Membangun lembaga pemerintahan digital yang terbuka dan terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan publik;
5. Membangun budaya digital dan memanfaatkan bonus demografi serta memberdayakan rakyat Indonesia dalam mengembangkan dunia digital; dan
6. Harmonisasi regulasi dan meningkatkan pendanaan untuk memajukan inovasi.

Untuk mewujudkan transformasi digital nasional ini, dibutuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat, kementerian/ lembaga terkait dan pemerintah pusat secara keseluruhan untuk mendukung mewujudkan 4 program-program digitalisasi. Selain itu, dengan dinamika yang tinggi, maka pemutakhiran dan perubahan dalam arah kebijakan

strategis menjadi hal yang perlu disesuaikan pada perkembangan di setiap tahun anggaran. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada satu dekade terakhir terus mengembangkan dan mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

3.1.2 Telaah Kebijakan Provinsi

VISI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT 2018-2023

"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin Dengan Inovasi dan Kolaborasi" (nilai religius, nilai bahagia, nilai adil, nilai kolaboratif dan nilai inovatif).

Yang dijabarkan ke dalam lima misi pembangunan dan sembilan program unggulan, yaitu:

- 1. Misi pertama, membentuk manusia pancasila yang bertaqwa;** melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban, dengan sasaran misi yaitu pesantren juara, masjid juara, dan ulama juara;
- 2. Misi kedua, melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif;** dengan sasaran misi yaitu kesehatan juara, perempuan juara, olahraga juara, budaya juara, sekolah juara, guru juara, ibu juara, millennial juara, perguruan tinggi juara, dan smk juara;
- 3. Misi ketiga, mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah;** dengan sasaran misi yaitu transportasi juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, dan energi juara;
- 4. Misi keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan;** dengan sasaran misi yaitu nelayan juara, pariwisata juara, lingkungan juara, kelola sampah juara, tanggap bencana juara, ekonomi kreatif juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, umkm juara, dan wirausaha juara; serta
- 5. Misi kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;** dengan sasaran misi yaitu birokrasi juara, APBD juara, ASN juara, dan BUMD juara.

Program Unggulan Provinsi Jawa Barat 2018-2023 sebagai berikut:

Pertama, meningkatkan akses pendidikan untuk semua;

Kedua, desentralisasi pelayanan kesehatan;

Ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi;

Keempat, mengembangkan destinasi dan infrastruktur pariwisata;

Kelima, mewujudkan pesantren juara;

Keenam, meningkatkan infrastruktur konektivitas wilayah;

Ketujuh, gerakan membangun desa;

Kedelapan, memberikan subsidi gratis untuk golongan ekonomi lemah; serta

Kesembilan, meningkatkan inovasi pelayanan publik dan penataan daerah. (Sumber :

<https://jabarprov.go.id>)

Visi Misi tersebut salah satunya didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis. Dengan adanya layanan *online*, termasuk dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik, dan masyarakat berbudaya informasi. Hal tersebut sebagai suatu upaya dalam bentuk aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik dengan berbasiskan kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Jawa Barat.

Dengan terwujudnya Visi Misi tersebut diharapkan diperoleh manfaat antara lain:

Bagi Pemerintah Daerah :

- Memudahkan komunikasi antar unit kerja;
- Memudahkan pengiriman dan pengelolaan data;
- Mewujudkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah.

Bagi Masyarakat :

- Kemudahan akses internet untuk berbagai aktivitas;
- Mendapatkan layanan yang lebih mudah;
- Meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hal ini sejalan dengan:

- Perubahan besar (transformasi) dalam kehidupan masyarakat terjadi sebagai pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- Percepatan proses modernisasi menuju terwujudnya masyarakat informasi (*Information Society*) dengan merubah diri secara gradual *resource based society* menjadi *Knowledge based society*.

Masyarakat informasi ditandai dengan:

- Karya-karya bidang informasi;
- Volume arus informasi yang sangat besar ;
- Interaktivitas relasi-relasi ;
- Integrasi dan konvegrasi aktivitas-aktivitas;
- Pertumbuhan dan interkoneksi jaringan-jaringan;
- Kecenderungan mengglobal;
- Budaya post modern;
- Dan perubahan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dan sasaran Renja Dinas Kominfo adalah sebagai berikut:

3.1.3 Telaahan Kebijakan Kabupaten

Visi Kabupaten Ciamis :

"MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI SEJAHTERA UNTUK SEMUA"

Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

Bahwa dalam 5 tahun kedepan perekonomian daerah Kabupaten Ciamis harus kokoh kuat dalam menghadapi situasi perekonomian nasional yang seringkali tidak menentu dan perekonomian global yang berdampak terhadap perekonomian daerah. Salah satu solusi untuk meredam dampak tersebut adalah perlunya membangun kemandirian, dalam arti perekonomian harus dibangun atas dasar kekuatan potensi sumberdaya yang kita miliki, baik sumberdaya alam, sumberdaya buatan, maupun sumberdaya manusia. Selain itu perekonomian dibangun dengan memperkuat ekonomi rakyat sebagai soko guru perekonomian nasional yang selama ini telah terbukti dapat memberikan penghidupan dan pekerjaan kepada rakyat. Bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus memberikan dampak pertumbuhan yang tinggi untuk mencapai kesejahteraan, tetapi kesejahteraan harus dinikmati oleh semua orang (merata dan berkeadilan)

Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 yaitu MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI SEJAHTERA UNTUK SEMUA, merupakan Visi yang sesuai dengan Visi Kabupaten Ciamis tahun 2005-2025, yaitu Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Kriteria capaian Visi Daerah tahun 2005-2019 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Ciamis Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 secara jelas direfleksikan pada Visi Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.

Selaras dengan visi Kabupaten Ciamis tersebut, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Ciamis di Kabupaten Ciamis juga mempunyai visi yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yaitu "Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi di Kabupaten Ciamis".

Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Kabupaten Ciamis untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Misi Kabupaten Ciamis:

Sesuai dengan visi **"MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI SEJAHTERA UNTUK SEMUA"**, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Ciamis 2019 –2024 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur daerah yang mendukung pengembangan wilayah

Misi 3 : Mengembangkan perekonomian yang berbasis ekonomi kerakyatan, potensi unggulan lokal dan pemberdayaan masyarakat

Misi 4 : Meningkatkan kualitas dan daya dukung lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

Misi 5 : Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien

Misi 6 : Memperkuat otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa.

Dinas Komunikasi dan Informatika termasuk kedalam misi 5 yaitu Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga ikut serta dalam pembangunan daerah di Kabupaten Ciamis.

Dalam rangka mendukung capaian misi tersebut, penerapan SPBE di Kabupaten Ciamis mempunyai misi:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu;
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
3. Membangun fondasi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal;
4. Membangun Sumber Daya Manusia yang kompeten dan inovatif berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Sejalan dengan kondisi di tingkat Nasional dan kondisi Jawa Barat, serta berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. Pembangunan dan pengembangan Data Center sebagai pusat data Pemerintah kabupaten Ciamis;
2. Peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tupoksi serta penyelenggaraan pelayanan public;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang menguasai teknologi informasi, statistik dan persandian;
4. Peningkatan implementasi e-government Pemerintah Kabupaten Ciamis;
5. Penyediaan regulasi/kebijakan daerah yang mendukung tata kelola persandian, statistik dan komunikasi informasi publik;
6. Optimalisasi penyediaan dan pengelolaan data statistik sektoral dalam mendukung pengambilan keputusan;
7. Optimalisasi penyediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat;
8. Optimalisasi penyelenggaraan persandian serta pengamanan data/informasi pemerintah daerah.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana bidang komunikasi dan informatika, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dibidang komunikasi dan informatika, melaksanakan urusan komunikasi dan informatika berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi Jawa Barat.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis mengacu pada Peraturan Bupati Ciamis Nomor 49 Tahun 2016. Adapun tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

3.2.1 Tujuan

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan urusan kominfo, persandian dan statistik;
2. Mewujudkan efektifitas kegiatan dalam penyelenggaraan pendayagunaan urusan kominfo, persandian dan statistik;
3. Optimalnya penggunaan alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan teknologi, informasi dan komunikasi di Jawa Barat;
4. Membangun pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika, komunikasi dan penyebarluasan informasi yang efektif untuk mendukung terwujudnya tatakelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien.

Untuk mendukung tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ciamis menerapkan SPBE yang bertujuan untuk:

1. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
2. Mewujudkan Pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;
3. Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu.

3.2.2 Sasaran

Sasaran penerapan SPBE di Kabupaten Ciamis adalah :

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi pada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi;
4. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023

Program adalah rangkaian kegiatan-kegiatan atau seperangkat tindakan untuk mencapai tujuan. Suatu program dalam mencapai tujuannya akan tersusun dalam melakukan perencanaan program. Kemudian program juga merupakan himpunan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Kominfo sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Lembaga Teknis Daerah yang melaksanakan sebagai penyelenggara dibidang komunikasi dan informatika dituntut untuk menghasilkan program-program yang berkualitas untuk menunjang keberhasilan pembangunan teknologi informasi Kabupaten Ciamis.

Apabila dikaitkan dengan Visi dan Misi Kabupaten Ciamis pada dasarnya kegiatan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis harus mampu mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien sebagai penggerak/pelaksana E-Government, diseminasi informasi dan teknologi informasi dalam menyebarkan informasi pembangunan daerah di kabupaten Ciamis (prioritas) juga skala Provinsi ataupun skala Nasional.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Ciamis tahun 2019 - 2024 yaitu “Mantapnya Kemandirian Ekonomi Sejahtera Untuk Semua” maka program dan kegiatan yang dirancang Diskominfo Kabupaten Ciamis pada tahun 2023 terdiri dari :

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

- 1) Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
- 2) Pelayanan informasi publik;
- 3) Layanan Hubungan Media;
- 4) Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
- 5) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.

2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah.

- b. Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
- 2) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 3) Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/ kota cerdas dan kota cerdas; dan
- 4) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

- 1) Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistic sektoral;
- 2) Membangun metadata statistic sektoral.

4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

Penyediaan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupten/ Kota.

Program Penunjang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; dan
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 2) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

BAB IV PENUTUP

Rencana kerja tahun 2023 ini disusun sebagai kerangka acuan didalam perencanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis selama satu tahun. Dengan adanya program kerja tersebut diharapkan pelaksanaan setiap kegiatan dapat berjalan secara terarah, terencana, terpadu dan sinergis dalam mencapai sasaran.

Rencana kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan SKPD tahun 2023. Keberhasilan pelaksanaan Renja Diskominfo Kabupaten Ciamis tidak terlepas dari peran serta tanggung jawab seluruh pegawai Diskominfo Kabupaten Ciamis serta peran aktif stakeholder terkait.

Ciamis, 30 Januari 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIAMIS**



H. TINO ARMYANTO LS, S.T., M.Si.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 197503042001121002